

PERAN GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA JEMAAT

Karwanto Oktofianus Hohakay, Tomi Itje,
Oscar Jeferson Scheitzer May, Demianus Ice

Program Studi Pendidikan Agama Kristen Universitas Halmahera, Indonesia

*Korespondensi: Tomiitje331@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) in providing political education to its congregation ahead of the 2024 General Election in Tobelo District, focusing on how the church educates its members about politics following Christian values. The qualitative research method, with a case study approach, involves in-depth interviews with five GMIH synod leaders. Data were analyzed using thematic analysis techniques. The results indicate that GMIH has successfully implemented effective political education, emphasizing the understanding of rights and obligations in democracy, integrating Christian values, and using information technology. The church also plays a crucial role in maintaining the harmony of the congregation and avoiding practices of money politics. In conclusion, the political education provided by GMIH enhances the congregation's awareness and ethical political participation, supporting the church's goal of promoting justice and goodness in society.*

Keywords: *political education, Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH), Christian values, political participation, democracy*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tobelo, dengan fokus pada bagaimana gereja mendidik jemaat tentang politik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan lima pemimpin sinode GMIH. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMIH telah berhasil melaksanakan pendidikan politik yang efektif, menekankan pemahaman hak dan kewajiban dalam demokrasi, integrasi nilai-nilai Kristiani, dan penggunaan teknologi informasi. Gereja juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan jemaat dan menghindari praktik politik uang. Kesimpulannya, pendidikan politik yang diberikan oleh GMIH meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik jemaat secara etis, mendukung tujuan gereja dalam mempromosikan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan politik, Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), nilai-nilai Kristiani, partisipasi politik, demokrasi

PENDAHULUAN

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang didirikan pada tahun 1949 telah memainkan peran penting dalam pelayanannya melalui tiga panggilan utama gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melalui pelayanan ini, GMIH berusaha membawa umatnya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, GMIH juga memberikan edukasi politik kepada warganya, menekankan bahwa politik gereja bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan. Dengan demikian, GMIH membantu warganya memahami peran penting mereka dalam proses demokrasi, membentuk pemahaman yang komprehensif, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, dengan berbagai pemilihan umum yang akan menentukan arah masa

depan negara. Partisipasi aktif dan kesadaran politik yang tinggi dari setiap warga negara menjadi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak, berlandaskan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang calon-calon pemimpin serta visi dan misi mereka untuk Indonesia.

Sebagai anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) memiliki sekitar 191.285 jemaat. Dengan jumlah yang signifikan ini, gereja memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan umatnya menghadapi tahun politik 2024. Para pemimpin gereja bertugas membimbing jemaat agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip Kristiani dalam kehidupan politik mereka. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik warga gereja sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi dengan pemahaman yang mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara dan orang Kristen.

Sebagai bagian dari masyarakat yang pluralistik, warga GMIH dihadapkan pada beragam tantangan dan dinamika politik yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan sikap yang bijak. Melalui pendidikan politik yang efektif, diharapkan para warga jemaat GMIH dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menanamkan nilai spiritualitas, moral, dan etika yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.

Fenomena yang sering terjadi dalam momentum politik di kalangan warga GMIH mencakup kesenjangan keharmonisan keluarga, kenyamanan persekutuan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan pilihan dalam pesta demokrasi, yang membuat gereja dijadikan sebagai objek pelampiasan emosi untuk menanggapi kegelisahan warga gereja yang bermasalah. Selain itu, perilaku politik warga GMIH sering kali secara etika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, seperti keterlibatan dalam politik uang. Masalah politik uang menjadi sorotan banyak kalangan karena dianggap merusak tatanan demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya minimnya pendidikan politik dan pencitraan politik yang kurang baik serta pemahaman yang salah tentang politik (Hunayati 2016).

Gianto (2022) mengungkapkan bahwa politik adalah aktivitas manusia yang memiliki kepentingan yang diizinkan Tuhan. Politik bukan hanya sarana demokrasi kekuasaan, tetapi juga seni kemungkinan dalam mengatur warga kota atau negara. Pada umumnya dipahami bahwa gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang dan menjadi milik Allah serta telah mengalami pemulihan Allah. Gereja diberikan tugas mulia oleh Allah untuk menjadi alat kebenaran, serta menjadi garam dan terang dunia untuk menerangi sesama (Mat. 5:13-16).

Gereja seharusnya menjadi pelopor yang mengarahkan praktik demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan yang didasarkan pada takut kepada

Tuhan. Alkitab juga mengajarkan gereja untuk mengarahkan salah satu tri tugas panggilannya di bidang politik, sehingga tercipta sistem demokrasi yang dapat mensejahterakan kaum marginal (Hutahaean 2021).

Secara konkrit, gereja sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pendidikan politik bagi warganya. Pendidikan politik, seperti dikemukakan Bashori (2018) adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik yang berlaku, serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari pendidikan politik adalah agar masyarakat dapat lebih memahami mekanisme dan struktur politik, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, serta membuat keputusan yang bijak dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan publik.

Dikemukakan oleh Arifianto bahwa pentingnya gereja dalam melakukan pendidikan politik terletak pada peran krusialnya dalam membimbing dan mendidik warga jemaat untuk memahami paradigma dan tujuan politik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Sebagai lembaga kerohanian, gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jemaatnya hidup sesuai dengan kebenaran Alkitabiah sambil tetap aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik yang dipimpin oleh gembala sidang, jemaat dapat menerima pengajaran politik, pencerahan, dan bimbingan yang diperlukan untuk menghindari praktik-praktik politik yang tidak etis dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik dalam gereja tidak hanya membantu jemaat menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat moralitas dan keadilan dalam ranah politik, menjadikan gereja sebagai teladan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat (Arifianto 2023).

Politik merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial (Rungkat 2022) dan pendidikan politik sejalan dengan misi gereja karena keduanya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia melalui penerapan nilai-nilai etis dan moral yang tinggi. Gereja memiliki misi untuk membawa terang dan garam dunia, mengarahkan jemaatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang mengutamakan keadilan, kasih, dan kebenaran (Rohi 2017). Dalam konteks politik, pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Kristiani membantu jemaat memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang tidak hanya menghindari praktik politik yang korup tetapi juga aktif memperjuangkan kebijakan yang adil dan mensejahterakan. Dengan membekali jemaat pengetahuan politik yang benar, gereja turut mendukung terbentuknya sistem demokrasi yang bersih dan berintegritas, sehingga misi gereja dalam membawa transformasi positif di masyarakat dapat terwujud secara nyata (Padondan 2020).

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun dengan banyak agenda politik di mana warga gereja akan terlibat di dalamnya, apakah gereja-gereja sudah melakukan

pendidikan politik kepada warganya agar partisipasi politik mereka sejalan dengan nilai-nilai Kristen?

Untuk itu mengetahui hal tersebut penulis melakukan penelitian di Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dengan subyek penelitian para pemimpin gereja di tingkat sinodal maupun jemaat untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang peran gereja dalam melaksanakan pendidikan politik.

Sudah beberapa penulis yang melakukan penelitian dengan topik peran gereja dalam pendidikan politik. Salah satunya adalah penelitian Arifianto (2023) tentang *Peran Gembala Sidang dalam Mewujudkan Pendidikan Politik bagi Warga Gereja*. Arifianto menemukan bahwa gembala sidang memiliki tanggung jawab dan peran yang dapat dilaksanakan untuk mengadakan pendidikan politik bagi warganya. Penelitian lain adalah penelitian Arifianto dan Ngesthi (2023) yang menyoroti pentingnya pemimpin gereja melakukan edukasi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dalam jemaat sebagai dampak dari kontestasi politik yang melibatkan warga gereja. Ada juga Rantung (2017) yang melihat peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam pendidikan politik. Menurut Rantung, pendidikan politik dalam PAK membantu komunitas orang percaya Kristus untuk tidak bersikap antipolitik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, komunitas iman dapat memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan iman Kristen dalam proses politik, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Namun demikian, penelitian tentang pendidikan politik dalam konteks Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), khususnya dari perspektif pemimpin gereja belum pernah dilakukan. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik tentang peran institusi keagamaan dalam pendidikan politik, memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi nilai-nilai Kristiani dalam edukasi politik, dan mengembangkan model pendidikan politik berbasis keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan akan meningkatkan partisipasi jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam Pemilihan Umum 2024, membentuk pemimpin gereja yang kompeten dalam politik, dan merancang program pelatihan politik yang efektif. Selain itu, penelitian ini memperkuat peran gereja dalam masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan etika politik di kalangan jemaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan detail terhadap sejumlah kecil kasus untuk memahami permasalahan atau situasi tertentu secara komprehensif (Assyakurrohim et al. 2022). Peneliti memilih studi kasus karena memungkinkan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan detail peran pemimpin sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam

memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tobelo. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan dan menggali informasi yang lebih mendalam. Subyek penelitian adalah pemimpin sinode GMIH yang memiliki peran langsung dalam pendidikan politik bagi jemaat. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali pandangan, strategi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sinode dalam menjalankan edukasi politik.

Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Prosesnya meliputi transkripsi wawancara secara verbatim, pengkodean bagian penting dari transkrip, identifikasi tema dengan mengelompokkan kode serupa, dan peninjauan tema untuk memastikan relevansi dan validitas. Tema yang telah ditentukan diberi nama yang jelas untuk memudahkan interpretasi. Terakhir, interpretasi dan pelaporan dilakukan dengan menyusun narasi temuan penelitian berdasarkan tema-tema yang diidentifikasi, disertai kutipan relevan dari wawancara (Sitasari 2022).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tobelo. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang pimpinan GMIH. Tiga di antaranya adalah anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GMIH periode tahun 2022-2027, satu orang ketua bidang di tingkat sinodal, dan satu orang lagi ketua jemaat di lingkungan GMIH.

Dari wawancara terhadap para pimpinan GMIH ini terdapat beberapa temuan utama yang relevan terkait dengan pendidikan politik bagi warga gereja. Pertama, Badan Pekerja Harian Sinode GMIH telah melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik dalam memberikan pendidikan politik kepada warga gereja. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah agar warga gereja memahami hakikat politik dalam tatanan demokrasi, menghargai hak konstitusional mereka, dan menghindari praktik politik yang tidak etis. GMIH berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis namun tetap memberikan edukasi yang memungkinkan jemaat untuk berpartisipasi secara bijak dalam proses demokrasi.

Kedua, GMIH memiliki misi utuh, mandiri, dan misioner yang mengedepankan tanggung jawab moral dalam memberikan pendidikan politik. Gereja berperan aktif dalam menyadarkan jemaat mengenai pentingnya partisipasi dalam politik dengan tetap berpegang pada prinsip dan asas demokrasi. Melalui pendidikan politik, jemaat diharapkan dapat menentukan pilihan politiknya secara sadar dan bertanggung jawab.

Ketiga, GMIH telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mengedukasi jemaat tentang politik, termasuk penggunaan mimbar edukasi melalui media online

dan website gereja. Platform ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi kelembagaan termasuk pendidikan politik, yang bertujuan untuk mencerdaskan jemaat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses politik.

Keempat, GMIH juga menghadapi dinamika persoalan politik, seperti kampanye hitam yang mengakibatkan perpecahan di masa lalu. Untuk mengantisipasi hal ini, gereja telah mengambil langkah-langkah proaktif melalui pendidikan politik guna menjaga persaudaraan yang rukun dan damai serta menghindari perpecahan di kalangan jemaat. Gereja berupaya memastikan bahwa setiap warga gereja yang terlibat dalam kontestasi politik memahami pentingnya menerima hasil pemilu dengan lapang dada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GMIH telah berhasil mencapai salah satu misinya di bidang politik, yaitu memberikan pendidikan politik yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama kepada jemaatnya. Pendidikan politik yang dilakukan oleh GMIH berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik warga gereja, mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan menjaga integritas serta keharmonisan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Politik dalam Gereja sebagai Agen Edukasi

GMIH telah menjalankan peran penting sebagai agen edukasi politik bagi jemaatnya. Menurut Pdt. Abram Ugu, M.Si, Sekretaris Umum Sinode GMIH, Badan Pekerja Harian Sinode GMIH telah melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik dalam memberikan pendidikan politik kepada warga gereja. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah agar warga Gereja Masehi Injili di Halmahera memahami hakikat politik dalam tatanan demokrasi (Wawancara, Mei 2023).

Tujuan pendidikan politik yang hendak dicapai GMIH ini sejalan dengan teori pendidikan politik yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan warga negara. Sutrisman mengemukakan bahwa secara sederhana bisa dikatakan bahwa pendidikan politik adalah sebuah proses penyadaran atau pendewasaan politik anggota masyarakat. Kesadaran tersebut antara lain adalah kesadaran tentang tanggung jawab berbangsa dan bernegara agar kemerdekaan bangsa dan negara tetap kokoh. Demikian juga pendidikan politik dapat menumbuhkan kesadaran kritis warga negara sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap realitas politik yang sedang berlangsung (Sutrisman 2019).

Sukarno mengatakan bahwa pendidikan politik juga dimaksudkan untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat, dan pembentukan atau pendidikan diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Sukarno 2011). Dengan demikian, pendidikan politik dalam membentuk kesadaran seseorang tentang politik dan selanjutnya menjadikannya bertanggung jawab dalam menyikapi realitas politik.

Apabila gereja menjalankan pendidikan politik, maka akan terbentuk jemaat yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang dilakukan oleh gereja akan meningkatkan kesadaran politik jemaat, menjadikan mereka lebih kritis dan mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap realitas politik yang sedang berlangsung. Selain itu, pendidikan politik akan membantu jemaat menyadari kedudukan politik mereka di tengah masyarakat, serta membentuk mereka menjadi insan politik yang bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka dalam demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik yang diberikan oleh gereja tidak hanya memperkuat integritas moral dan etika jemaat dalam berpolitik tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai dinamika politik.

Integrasi Nilai-nilai Kristiani dalam Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang diberikan oleh GMIH tidak terlepas dari nilai-nilai Kristiani. GMIH terus membahas topik peran politik dan menghargai hak konstitusional sebagai warga negara. Pdt. Ferri Kabarey, M.Th, Wakil Ketua II Sinode GMIH, menyatakan bahwa gereja memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik kepada warga gereja dengan tujuan agar mereka memahami apa itu politik dan apa itu gereja (Wawancara, Mei 2023). Ini mendukung pandangan bahwa politik tidak hanya mengenai kekuasaan tetapi juga tentang pelayanan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, sesuai dengan konsep koinonia, diakonia, dan marturia dalam teologi Kristen.

Politik, seperti digambarkan Haboddin, tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Dalam studi-studi tentang politik yang dibahas umumnya adalah tentang kekuasaan. Bahkan sejak zaman dahulu kekuasaan dianggap sebagai unsur utama dari tindakan politik. Namun sebenarnya kekuasaan memiliki dua *locus*. Pertama, kekuasaan dipahami sebagai kekuatan atau dominasi. Dalam makna ini kekuasaan adalah alat untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau alat untuk mengontrol pihak lain. Kedua, kekuasaan sebagai pengaruh yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (Haboddin 2017).

Namun dalam ajaran Kristen ditekankan bahwa kekuasaan sejati berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk melayani sesama dengan rendah hati dan kasih. Yesus Kristus mengajarkan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang melayani, bukan yang mencari keuntungan pribadi atau dominasi atas orang lain seperti tercantum dalam Markus 10:42-45 bahwa siapa yang ingin berkuasa haruslah menjadi hamba untuk semuanya (Pasaribu, Nababan, dan Gea 2023).

Kekuasaan dalam pandangan Kristen adalah sarana untuk mengimplementasikan keadilan, kasih, dan perdamaian, serta untuk memberdayakan dan memajukan kesejahteraan semua orang, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Ajaran ini menekankan tanggung jawab moral yang besar bagi mereka yang

memegang kekuasaan untuk menggunakannya dengan bijaksana dan adil, mencerminkan kasih dan keadilan Allah.

Ajaran Kristen mengenai kekuasaan memiliki implikasi penting dalam pendidikan politik di gereja, yaitu menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani masyarakat dengan keadilan, kasih, dan perdamaian, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pendidikan politik di gereja akan membentuk jemaat yang melihat politik sebagai sarana untuk implementasi nilai-nilai Kristiani, mendorong partisipasi dengan integritas dan tanggung jawab moral, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jemaat akan didorong untuk aktif dalam demokrasi, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan semua orang, terutama yang lemah dan terpinggirkan, menjadi agen perubahan positif yang mencerminkan kasih dan keadilan Allah dalam tindakan politik mereka.

Tanggung Jawab Moral Gereja dalam Pendidikan Politik

GMIH memandang pendidikan politik sebagai bagian dari tanggung jawab moral gereja. Menurut Pdt. Silwanus Banggai, M.Th, Wakil Ketua IV Sinode GMIH, gereja memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi politik agar warga gereja menghindari dampak yang tidak diharapkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia (Wawancara, 2023). Dengan demikian, pendidikan politik yang dilakukan oleh GMIH bertujuan untuk menjaga integritas dan moralitas jemaat dalam berpartisipasi dalam proses politik.

Salah satu fenomena negatif yang terus terjadi dalam setiap perhelatan politik adalah politik uang di mana kandidat atau partai politik menggunakan uang atau imbalan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar mendukung mereka. Lampus dkk (2019) menemukan bahwa politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako maupun uang tunai. Transaksi seperti ini berjalan dengan lancar karena adanya hubungan jaringan antara kandidat dengan tim sukses, dan tim sukses dengan anggota masyarakat.

Praktik politik merupakan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Satria menemukan bahwa sebenarnya partai politik juga harus dimintai pertanggungjawaban atas praktek politik uang. Namun sampai sejauh ini praktik ini masih sangat sulit diberantas (Satria 2019).

Politik uang merusak integritas proses demokrasi, karena keputusan pemilih tidak didasarkan pada visi, misi, atau kompetensi kandidat, melainkan pada keuntungan finansial jangka pendek. Politik uang menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik, memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak yang memiliki sumber daya lebih banyak, dan sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum setelah kandidat terpilih. Selain itu, politik uang juga mencoreng nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik, dan memperburuk korupsi di dalam pemerintahan.

Sebab itu penting bagi gereja untuk melakukan pendidikan politik dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana politik uang. Seperti dikatakan Satria bahwa sangat penting untuk dilakukan tindakan pencegahan melalui pesan-pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat (Satria 2019). Pesan moral merupakan bagian dari ajaran agama.

Dari sudut pandang ajaran Kristen, politik uang merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kristen mengajarkan bahwa segala bentuk kekuasaan dan pengaruh harus digunakan untuk melayani dan memajukan kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Politik uang mengabaikan prinsip-prinsip ini dengan mendorong tindakan korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan. Dalam ajaran Kristen, pemimpin yang sejati adalah pelayan yang bertindak dengan integritas dan transparansi, menghormati martabat setiap individu, dan berkomitmen untuk keadilan sosial. Oleh karena itu, praktik politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi tetapi juga menodai panggilan moral untuk mencintai dan melayani sesama dengan tulus. Belajar dari Kel 18:21, Oddeng dan Wilayanto (2021) mengemukakan bahwa politik uang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Hal yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin adalah integritas.

Oleh sebab itu, dalam pendidikan politik di gereja, politik uang diajarkan sebagai praktik yang bertentangan dengan ajaran Kristen, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan pelayanan kepada sesama. Gereja mendidik jemaat untuk memahami bahwa politik uang merusak integritas demokrasi, mendorong korupsi, dan mengabaikan nilai-nilai Kristiani. Melalui pendidikan politik, gereja berupaya membentuk warga yang berpartisipasi secara etis dalam politik, menolak politik uang, dan memilih pemimpin berdasarkan visi dan integritas mereka.

Strategi Gereja dalam Menghadapi Dinamika Politik

GMIH telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi dinamika politik yang kompleks, termasuk penggunaan mimbar edukasi melalui media online dan website gereja. Pdt. Silwanus Banggai menjelaskan bahwa website gereja digunakan sebagai platform untuk menyampaikan informasi pendidikan politik secara kelembagaan, dengan tujuan mencerdaskan jemaat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses politik (Wawancara, Mei 2023). Ini menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan pendidikan politik, yang sejalan dengan teori komunikasi dalam konteks keagamaan.

Penelitian Riyanti dkk (2023) juga penelitian Ihyani dkk (2020) menunjukkan bahwa pendidikan politik cukup efektif dilakukan melalui media digital. Pendidikan melalui media online terbukti bisa mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam politik.

Gereja memiliki peluang besar untuk menggunakan media teknologi informasi sebagai sarana pendidikan politik, memanfaatkan platform seperti website, media

sosial, dan aplikasi mobile untuk menjangkau jemaat secara lebih luas dan efektif. Melalui teknologi ini, gereja dapat menyampaikan materi edukatif, diskusi interaktif, dan informasi terkini mengenai politik yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani, memperkuat kesadaran dan partisipasi politik yang etis. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan gereja untuk mengatasi batasan geografis, menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan digital, serta menyediakan sumber daya yang mudah diakses dan diperbarui, sehingga pendidikan politik menjadi lebih inklusif dan dinamis.

Kesiapan Jemaat dalam Partisipasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat GMIH telah dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum 2024. Pdt. Adelina Tassa, M.Pd, Pimpinan Jemaat Getsemani Wari, menyatakan bahwa gereja telah melaksanakan program pendidikan politik dengan tujuan menyadarkan warga untuk menentukan pilihannya sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia (Wawancara, Mei 2023). Ini sesuai dengan teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam politik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat menentukan kebijakan yang positif, yang didukung oleh pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka yang dihasilkan pun akan menjadi baik (Suharyanto 2003).

Implikasi Pendidikan Politik terhadap Keharmonisan Jemaat

GMIH juga berperan dalam menjaga keharmonisan jemaat di tengah dinamika politik. Gereja mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan politik. Pdt. Bob Tjanu menekankan pentingnya politik yang santun dan baik, serta memastikan bahwa politik diharapkan bisa berimplikasi positif kepada warga gereja (Wawancara, 2023). Dengan memberikan pendidikan politik yang tepat, GMIH berupaya untuk menjaga kesatuan dan kedamaian di kalangan jemaat, yang sejalan dengan konsep teologi Kristen tentang kehidupan persekutuan yang harmonis.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perhelatan politik seringkali berimbas pada terjadinya perpecahan di masyarakat, bahkan masuk ke dalam persekutuan jemaat di gereja (Kawangung dan Lele 2019). Pendidikan politik di gereja berfungsi untuk mengantisipasi konflik yang timbul akibat gesekan politik dengan menanamkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik, jemaat diajarkan untuk berpartisipasi secara damai dan bijaksana, menghindari provokasi, serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, pendidikan politik membantu menjaga keharmonisan komunitas,

memperkuat persatuan, dan mencegah perpecahan yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat.

Signifikansi Teologis dari Peran Gereja dalam Politik

Secara teologis, peran gereja dalam politik dapat dipahami sebagai bagian dari misi gereja untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16). Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ritual keagamaan tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang membawa berita keselamatan, keadilan, dan kedamaian dalam konteks politik. Pdt. Abram Ugu menyatakan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan tanda kerajaan Allah, agar umat memiliki kesejahteraan, kedamaian, dan sukacita (Wawancara, Mei 2023).

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam politik dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran Kristiani. Seperti dikemukakan Simamora bahwa meskipun secara organisasi gereja tidak bisa terlibat dalam politik praktis, namun gereja perlu mendukung anggotanya untuk berpartisipasi aktif. Secara organisasi gereja juga bisa menjalankan fungsi sosial kontrol melakukan dan menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah kehidupan politik di Indonesia (Simamora 2019).

Pendidikan politik di gereja bertujuan mendorong jemaat untuk aktif berpartisipasi dalam politik dengan cara yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Kristen, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih. Melalui pendidikan ini, gereja membekali jemaat dengan pemahaman yang benar tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang beriman, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang berintegritas dan berkontribusi pada kebijakan publik yang adil dan bermanfaat bagi semua. Partisipasi politik yang etis dan berlandaskan ajaran Kristiani ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan peran Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tobelo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMIH telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendidik jemaat tentang politik, mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani, dan menjaga etika politik. Pembahasan menunjukkan bahwa peran pendidikan politik dalam gereja tidak hanya memberikan pemahaman politik yang mendalam kepada jemaat tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral dan etika, memanfaatkan teknologi untuk edukasi, serta menjaga keharmonisan jemaat di tengah dinamika politik.

Hal yang penting dari keterkaitan antara hasil penelitian dan pembahasannya adalah bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh GMIH tidak hanya mempersiapkan jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi tetapi juga

membantu menjaga integritas dan moralitas dalam politik. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang peran institusi keagamaan dalam pendidikan politik dan memberikan model pendidikan politik berbasis nilai-nilai Kristiani yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Manfaat praktisnya adalah memberikan panduan bagi gereja-gereja lain dalam mengembangkan program pendidikan politik yang efektif, mempersiapkan jemaat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan menjaga kesatuan jemaat di tengah situasi politik yang kompleks.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang terbatas pada satu gereja di satu wilayah tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan gereja-gereja lain di berbagai wilayah dan mengkaji peran pendidikan politik dalam konteks keagamaan yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan teknologi dalam pendidikan politik gereja dan dampaknya terhadap partisipasi politik jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Yonatan Alex. 2023. "Peran Gembala Sidang dalam Mewujudkan Pendidikan Politik bagi Warga Gereja." *Jurnal Pentakosta Indonesia* 3, no. 2: 132–48. <https://doi.org/10.54403/rjtpi.v3i2.63>.
- Arifianto, Yonatan Alex, dan Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi. 2023. "Aktualisasi Pemimpin Gereja menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik." *Jurnal Salvation* 4, no. 1: 60–71. <https://doi.org/10.56175/salvation.v4i1.104>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01: 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Bashori, Khoiruddin. 2018. "Pendidikan Politik di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2: 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>.
- Gianto, Gianto. 2022. "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2: 45–50. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v3i2.23>.
- Haboddin, Muhtar. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Hunayati, Hunayati. 2016. "Relevansi Pandangan Gereja Tentang Politik Bagi Karya Pastoral di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya." *SEPAKAT-Jurnal Pastoral Kateketik* 3, no. 1: 107–18. <https://www.e-jurnal.stipas.ac.id/index.php/SEPAKAT/article/view/38>.
- Hutahaean, Hasahatan. 2021. "Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres." *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*

- 1, no. 1: 1–17. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.1>.
- Kawangung, Yudhi, dan Jeni Ishak Lele. 2019. “Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Kristen Di Indonesia: Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019.” *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1: 141–60. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v1i1.27>.
- Lampus, Christy Messy, Marlien T Lopian, dan Efvendi Sondakh. 2019. “Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea.” *Jurnal Eksekutif* 2, no. 3: 1–9.
- Malik, Ihyani, Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, dan Hamrun Hamrun. 2020. “Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan.” *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 1: 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.
- Oddeng, Zulkifli, dan Wilayanto Wilayanto. 2021. “Politik Uang Dalam Perspektif Etika Absolutisme.” *Jurnal Misioner* 1, no. 1: 77–98. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8>.
- Padondan, Daud. 2020. “Gereja Membutuhkan Politik dan Politik Membutuhkan Gereja.” OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k7sbw>.
- Pasaribu, Anessa Mei, Asima Putri Handayani Nababan, dan Ibelala Gea. 2023. “Pemimpin Yang Melayani Menurut Markus 10:42-45 Dan Relevasinya Bagi Kepemimpinan Kristen Masa Kini.” *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 1, no. 2: 01–09. <https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v1i2.219>.
- Rantung, Djoys Anneke. 2017. “Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia.” *Shanan* 1, no. 2: 58–73.
- Riyanti, Ratna, Amir Luthfi, dan Dian Rohana. 2023. “Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1: 26–31. <https://doi.org/10.37985/themis.v1i1.330>.
- Rohi, Yohanis Udju. 2017. “Misi Gereja Melalui Dunia Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. 1: 32–55. <https://doi.org/10.52157/me.v6i1.68>.
- Rungkat, Jimmy. 2022. “Teologi Politik Yesus: Sumbangsih Materi Bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen Di Politeknik Amamapare Timika.” *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA* 1, no. 1: 1–11. <https://doi.org/10.55334/sostekam.v1i1.190>.
- Satria, Hariman. 2019. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Simamora, Adolf Bastian. 2019. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.
- Sitasari, Novendawati Wahyu. 2022. “Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif.” *Forum Ilmiah Indonusa* 19, no. 1: 77–84. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5082>.
- Suharyanto, Agung. 2003. “Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian

InformasiPolitikpadaPartisipasi Politik Masyarakat.” *Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian InformasiPolitikpadaPartisipasi Politik Masyarakat* 6, no. 2: 126–126. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>.

Sukarno, Bedjo. 2011. “Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi.” *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 7, no. 1: 1–19. <https://doi.org/10.33061/ww.v7i1.420>.

Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.